

## Urgensi Bank-Bank Daerah Go Public

Indra Darmawan S.E., M.Si,  
Ketua Program Studi Pendidikan Ekonomi  
FKIP Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

**G**o public-nya sejumlah sejumlah BUMN/BUMD pernah mengundang kontroversi negatif. Salah satunya adalah isu nasionalisme. Isu ini membawa privatisasi menjadi sentimen politik. Tujuan penting *go public* untuk efisiensi dan maksimalisasi pelayanan publik, seolah-olah dimentahkan oleh agenda politisasi.

Tapi isu nasionalisme sudah tidak relevan mengingat manfaat *go public* ternyata lebih besar. Isu nasionalisme diduga dimunculkan pihak-pihak yang kepentingannya terusik. Resistensi terhadap penjualan saham BUMN dan atau BUMD nampaknya memang berkaitan erat dengan agenda kepentingan sempit oknum atau kelompok tertentu. Begitu perusahaan *listed*, ruang gerak penyimpangan-penyimpangan menjadi lebih sempit.

Kejadian 20 tahun silam patut menjadi bahan renungan. Saat itu bank-bank milik negara membentuk konsorsium untuk mengucurkan kredit bernilai triliunan rupiah untuk membiayai program mobil nasional. Kegagalan program tersebut mengakibatkan bank-bank pelat merah itu menderita kerugian besar. Kemudian bank-bank tersebut dimergers, lantas dijual sebagian sahamnya di bursa. Setelah *go public*, bank pelat merah itu mencatat kinerja kinclong dari tahun ke tahun.

Apa yang bisa dipetik dari pelajaran ini? Standar pengelolaan yang berbeda antara sebelum *listing* dan sesudahnya, ternyata memunculkan hasil yang signifikan. Ini disebabkan oleh penerapan *good corporate governance* secara ketat, di bawah tatapan mata lembaga-lembaga pemeringkat nasional dan internasional.

### Fenomena Bank BJB

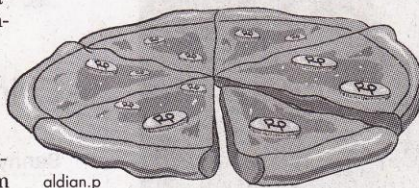
Dalam konteks itu, menarik membahas PT BJB Tbk, yang akarnya adalah bank pembangunan daerah (BPD), namun berani memelopori terobosan fenomenal dengan *go public*. Setelah Bank BJB, menyusul kemudian Bank Jatim yang juga sudah tercatat sebagai bank yang *listed* di bursa. Sejumlah BPD, seperti Bank DKI dan Bank Sumut, dikabarkan juga berminat *go public*.

Satu hal, keberadaan bank daerah distigmakan tidak bisa dilepaskan dari konstelasi politik daerah yang bersangkutan. Namun posisi Bank BJB sebagai perusahaan publik akan memperketat proses internalnya di bawah regulasi otoritas moneter dan otoritas bursa. Bank yang sudah *go public* ini sudah lebih dahulu dipagari untuk tetap fokus pada bisnisnya daripada perusahaan-perusahaan

non *go public*.

Kita memang pernah berada dalam era ketika bank-bank pelat merah dijadikan "sapi perah" oleh kelompok-kelompok kepentingan. Tentu ini menimbulkan trauma sejarah, sekaligus stigma. Pemberitaan miring terhadap Bank BJB akhirnya ini tidak dapat dilepaskan dari stigma sejarah yang panjang tersebut. Terlebih menjelang pemilu.

Pesta demokrasi memang baru akan dilangsungkan tahun depan. Namun tahun ini sudah mulai terasa meningkatnya iklim politik. Stigma dan tuduhan miring, tentu saja harus dijawab dengan hasil nyata. Kinerja adalah fakta obyektif yang menjadi pertimbangan banyak pihak, terutama investor. Bukan hanya kemampuan menciptakan laba secara historis, tetapi yang lebih penting lagi adalah profitabilitas di masa depan.



aldian.p

Sejatinya, Bank BJB adalah bank daerah yang telah mengalami transformasi melalui sejumlah terobosan berani. Bank yang dulu bernama Bank Jabar Banten kini menjadi sebuah *bank go national*. Penjualan saham di bursa merupakan satu bagian penting transformasi tersebut, menyusul kemudian, ekspansi jaringan ke kota-kota besar lain dan merubah nama menjadi Bank BJB.

Bank ini berani keluar dari paradigma lama dan mampu bersaing dengan bank nasional papan atas. BJB terus melakukan perluasan jaringan kantor dengan menyisihkan 10% dana hasil IPO untuk pengembangan IT (*information technology*). Semua itu membuka ruang bagi pertumbuhan berkesinambungan.

Laba bersih Bank BJB pun terus naik secara konsisten sebelum maupun setelah *go public*. Selama 2007-2011, laba bersih Bank BJB tumbuh 159,7%. Pada triwulan pertama 2013, Bank BJB meraup laba bersih Rp 372 miliar atau naik 37,5% dibanding periode yang sama 2012.

Kinerja positif yang berkesinambungan memang lebih layak menjadi fokus perhatian, dibandingkan isu negatif sesaat. Politisasi adalah hal yang wajar bagi perusahaan-perusahaan pelat merah, baik itu nasional maupun daerah. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana tetap menjalankan fungsi utama perusahaan yaitu memaksimalkan pelayanan publik, sembari menjaga kinerja agar tetap cantik di mata investor.

Tidak bisa dipungkiri Bank BJB harus

terus menjaga amanah masyarakat dan investor untuk terus menjalankan fungsinya. Agar pemberitaan yang bernuansa politis tidak membawa dampak buruk sebaiknya disikapi BJB dengan tetap fokus kepada bisnis. Fungsi pengawasan internal dan eksternal harus terus dimaksimalkan agar tumbuh sehat.

Selain itu, Bank BJB agar konsisten dengan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) untuk mencapai standar integritas tertinggi. Belum semua bank mampu menerapkan GCG - tata kelola dengan insip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran - dengan baik.

Di BJB, praktik GCG bukan hanya dijalankan segenap karyawan tingkat bawah, namun juga wajib dipraktikkan manajemen puncak. Maka, bank ini telah mendapat banyak penghargaan dalam implementasi GCG, di antaranya dari IICD untuk *Best Corporate Governance for Newly Listed* dan dari IICG sebagai *Indonesia trusted company*.

Bank BJB juga merupakan bank pertama yang bekerjasama dengan KPK dalam pengendalian gratifikasi. Wajar jika Bank BJB juga mendapatkan penghargaan dari KPK terkait dengan pelaporan gratifikasi. Menjaga dan meningkatkan GCG bukan sesuatu yang mudah. Bank BJB juga masuk dalam 10 perusahaan terbaik menurut penilaian Asean CG Scorecards yang dilaksanakan Institute for Corporate Directorship (IICD).

Pengelolaan bank membutuhkan manajemen risiko yang terus berkembang. Ini linier dengan risiko itu sendiri yang juga semakin kompleks. Itulah sebabnya diperlukan penyegaran manajemen risiko. Manajemen risiko mampu memberikan informasi dan perspektif kepada manajemen tentang semua profil risiko, perubahan mendasar mengenai produk, pasar dan lingkungan bisnis. Manajemen risiko juga bermanfaat untuk menghitung dan mengukur besarnya *risk exposure* dan bahkan mampu menghindari potensi kerugian yang lebih besar. Maka, Bank BJB membuat unit Credit Risk Review.

Industri perbankan tergolong *highly regulated*, dan kepatuhan (*compliance*) menjadi hal vital. Bank nasional wajib mematuhi semua peraturan perundang-undangan terbitan pemerintah, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, serta peraturan internal.

Status perusahaan *listed* akan berdampak positif pada kinerja GCG suatu perusahaan karena menuntut proses transparansi, khususnya dikaitkan dengan berbagai ketentuan yang ada dan terus berkembang. Penerapan GCG, manajemen risiko dan *compliance* menjadi tiga perisai penting menghadapi berbagai stigma dan politisasi. ■